

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan sumberdaya yang selalu berubah dari waktu ke waktu, yaitu secara kuantitas dan kualitasnya. Secara kuantitas, sumberdaya manusia senantiasa mengalami perubahan melalui pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di Indonesia tidak merata pada setiap wilayahnya, sehingga hal ini membuat beberapa wilayah tertentu memiliki sumberdaya manusia yang berlebihan. Melimpahnya sumberdaya manusia di beberapa wilayah yang terdapat di Indonesia, membuat pemerintah beranggapan bahwa perlu dilakukan pemerataan penduduk melalui program transmigrasi yang memiliki tujuan untuk pemeratakan persebaran penduduk, meningkatkan taraf hidup penduduk, menanggulangi kejadian bencana alam, dan mengurangi jumlah pengangguran (Sugiharyanto, 2006).

Dalam sensus penduduk tahun 1971, perbedaan jumlah penduduk sangat terlihat jelas antara penduduk di Provinsi Lampung dengan Provinsi di pulau Jawa. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 21.877.136 jiwa dan di Provinsi Jawa Barat terdapat 21.623.529 jiwa, sedangkan di Provinsi Lampung hanya terdapat 2.777.008 jiwa dengan luas daratan yang tidak jauh berbeda dengan provinsi-provinsi yang terdapat di Jawa (www.bps.go.id). Oleh karena itu, pada tahun 1972

pemerintah kembali melakukan pemerataan penduduk dengan membuka lokasi baru di wilayah Lampung, yang merupakan kawasan hutan dan pesisir. Wilayah pesisir yang terdapat di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan merupakan salah satu lokasi transmigrasi yang baru di buka pada tahun 1972.

Pada tahun 1973, beberapa penduduk di Lampung yang mendapat informasi mengenai adanya wilayah baru di Kecamatan Ketapang, merasa tertarik dan kemudian melakukan perpindahan secara swakarsa mandiri ke lingkungan yang sesungguhnya sangat jauh berbeda dengan lingkungan tempat tinggal warga sebelumnya. Penduduk yang melakukan perpindahan ke wilayah pesisir sebagian besar berlatar belakang sebagai petani, namun bagi mereka melakukan perpindahan ke wilayah yang baru dinilai sangat menguntungkan, walaupun harus meninggalkan daerah asal dan memulai hidup di daerah tujuan dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Akan tetapi, hal tersebut dilakukan karena beberapa wilayah di Lampung yang telah dihuni penduduknya sudah semakin padat, sehingga mereka membutuhkan lokasi baru supaya dapat dikelola menjadi tempat usaha untuk menunjang kesejahteraan hidupnya.

Pada sekitar tahun 70an, penduduk yang mendatangi wilayah pesisir di Kecamatan Ketapang jumlahnya belum terlalu banyak dan potensi alamnya pun belum seluruhnya dikelola oleh warga karena pengetahuannya mengenai wilayah pesisir masih sangat minim, sehingga banyak penduduk yang berasal dari Jawa ataupun Lampung tertarik untuk pindah ke Desa Pematang Pasir. Oleh karena itu, adanya pendatang membuat jumlah penduduk di Kecamatan Ketapang menjadi semakin meningkat. Ditambah lagi dengan tingginya angka kelahiran, yang

membuat laju pertumbuhan penduduk semakin berkembang pesat, sehingga pemerintah mulai mengatasinya dengan memajukan pendidikan, program KB, kesempatan wanita untuk bekerja, dan pemerataan pembangunan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak dari tingginya pertumbuhan penduduk.

Selain masalah pertumbuhan penduduk, potensi alam yang berbeda dengan lingkungan sebelumnya mendorong masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan menambah pengetahuan dan wawasannya mengenai lingkungan di wilayah pesisir. Hal ini perlu dilakukan supaya sumberdaya manusia dapat mengelola dan memanfaatkan potensi alamnya dengan baik dan benar, karena apabila sumberdaya manusia tidak memiliki pengetahuan mengenai potensi yang terdapat di wilayah tempat tinggalnya, maka hal tersebut dapat berdampak buruk pada potensi alamnya, seperti air tawar, *mangrove*, sawah, dan tambak yang merupakan beberapa potensi penting bagi masyarakat di wilayah pesisir.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan ilmu pengetahuan yang luas dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun nonformal. Hal ini juga perlu dilakukan supaya masyarakat dapat memiliki bekal untuk menghadapi setiap permasalahan di sekitarnya. Akan tetapi, perubahan sumberdaya manusia secara kualitas dapat tercapai apabila fasilitasnya mendukung. Fasilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia adalah fasilitas elektronik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas sumur dan kloset, serta fasilitas teknologi lainnya yang dapat menunjang kesejahteraan manusia.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini cenderung berjalan lambat, karena dibutuhkan persiapan yang matang untuk menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang bagi masyarakat. Akan tetapi, melalui perkembangan zaman fasilitas-fasilitas tersebut telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, sehingga kemajuannya cukup berkembang pesat. Selain itu, sistem birokrasi pada saat ini juga menjadi tuntutan bagi sumberdaya manusia supaya senantiasa menuju perubahan yang lebih baik dan maju. Salah satu contohnya adalah mengenai birokrasi untuk melamar pekerjaan, dimana seseorang harus memenuhi syarat dengan membawa ijazah pendidikannya. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki, maka peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik pun semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini untuk memperoleh pekerjaan, sumberdaya manusia harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan hal tersebut tidak lepas dari fasilitas pendukungnya.

Saat ini, penduduk di Desa Pematang Pasir telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya pendidikan, sehingga warga mulai meningkatkan jenjang pendidikannya supaya dapat menjadi sumberdaya manusia yang berkompeten. Oleh karena itu, seharusnya penduduk di Desa Pematang Pasir memilih bidang ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk menggali potensi alam di wilayah pesisir, supaya masyarakat mampu mengatasi setiap permasalahan yang terjadi karena kerusakan sumberdaya alam di wilayah pesisir. Akan tetapi, justru lebih banyak warga memilih bidang ilmu kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, meskipun secara tidak langsung dapat memberi pengaruh baik bagi kemajuan Desa Pematang Pasir.

Kerusakan pada sumberdaya alam merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat di wilayah pesisir. Akan tetapi, selain itu tantangan juga dapat datang dari dalam diri manusia sendiri. Oleh karena itu, sumberdaya manusia harus berusaha merubah cara mengelola serta memanfaatkan potensi alam yang terdapat di lingkungannya, supaya kondisi sumberdaya alam dapat pulih kembali dan tidak berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya di masa yang akan datang.

Perubahan sumberdaya manusia yang terjadi di Kecamatan Ketapang Desa Pematang Pasir dapat memberi dampak positif maupun negatif pada lingkungannya. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang berkembang pesat sejak tahun 1973 yang kemudian disesuaikan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berlangsung lambat, kemungkinan dapat memberi dampak negatif pada sumberdaya alamnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mencari tahu dampak perubahan sumberdaya manusia terhadap potensi alam di wilayah pesisir yang terdapat di Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “bagaimanakah dampak perubahan sumberdaya manusia terhadap potensi alam di wilayah pesisir?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu dampak perubahan sumberdaya manusia terhadap potensi alam di wilayah pesisir Pematang Pasir Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara akademis maupun praktis:

1. Kegunaan akademis, sebagai salah satu upaya untuk memperkaya khasanah ilmu sosiologi terutama mengenai Sosiologi Lingkungan, Sosiologi Pedesaan, Sosiologi Pendidikan, Perubahan Sosial, dan Kependudukan.
2. Kegunaan praktis, sebagai bahan masukan dan informasi bagi pembaca, supaya dapat berubah kearah yang lebih baik sehingga mampu mengelola potensi alam yang terdapat di lingkungan tempat tinggalnya. Bagi pemerintah daerah juga agar lebih memperhatikan masyarakat yang mengikuti program transmigrasi, terutama bagi masyarakat yang memasuki lingkungan berbeda dengan lingkungan di tempat tinggal sebelumnya.